

## **ANALISIS REALISASI PROGRAM KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN GIANYAR MELALUI PENGUKURAN *VALUE FOR MONEY* TAHUN 2014-2016**

Kadek Gita Wahyuni

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,  
Indonesia

e-mail: kadekgita17@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam merealisasikan program kerja yang ditinjau melalui pengukuran *value for money* yaitu perspektif ekonomi, perspektif efisiensi, dan perspektif efektivitas tahun 2014-2016. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan melibatkan empat variabel yaitu realisasi program ditinjau dari perspektif ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dan objeknya adalah kinerja keuangan. Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *value for money*. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa realisasi program Dinas Pariwisata dari perspektif ekonomis yaitu 4 program tergolong sangat ekonomis, 10 program tergolong ekonomis, 3 program tergolong cukup ekonomis, dan 3 program tergolong kurang ekonomis. Realisasi program Dinas Pariwisata dari perspektif efisiensi yaitu 1 program tergolong efisiensi, dan 19 program tergolong kurang efisiensi. Keseluruhan realisasi program Dinas Pariwisata dari perspektif efektivitas tergolong efektif.

**Kata kunci :** *value for money*, realisasi program

### **Abstract**

This research aimed to go objective schema about Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar's work in order to realize the work plans which is observed by measuring value for money such as economy perspective, efficiency perspective, and perspective of effectiveness in 2014-2016. This research was descriptive research in which involved four variables is the realization of program in terms of economy perspective, efficiency, and effectivity. The subject of Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar and the object of this study was financial works. The data in this research was qualitative data which is gotten by documentation and interview method. Data analysis in this research used the measurement of value for money. The conclusions of the analysis were the realization of programs in Dinas Pariwisata based on economy perspective were 4 programs belong to very economical, 10 programs belong to economically, 3 programs belong to quite economic, and 3 programs belong to less economic. The realization of programs in Dinas Pariwisata based on efficiency perspective were 1 programs belong to efficient, and 19 programs belong to less efficient. All of the programs in Dinas Pariwisata based on effectivity perspective belong to effective.

**Key words:** value for money, realization of program

### **PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada kepentingan sosial dimana sumber

legitimasinya berasal dari masyarakat, karena orientasinya kepada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya bukan

berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah harus diimbangi dengan terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Saat ini organisasi sektor publik menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. "Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi" Mardiasmo (2009:4). Berbagai kendala ini menyebabkan banyaknya tekanan untuk menyelenggarakan organisasi sektor publik, hal ini menimbulkan sebuah tuntutan terhadap transparansi kinerja sektor publik meliputi ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas publik, dan tanggung jawab dari sektor publik untuk memperhatikan kinerjanya.

Salah satu organisasi sektor publik yang mempunyai peranan dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah yaitu Dinas Pariwisata. Berdasarkan perda Kabupaten Gianyar No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Gianyar. Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar memiliki tugas: melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan, pembinaan dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata mempunyai fungsi: merumuskan kebijakan teknis kepariwisataan, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kepariwisataan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas kepariwisataan, melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai organisasi sektor publik perlu memerhatikan *value for money* dalam menjalan aktivitasnya, implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Menurut Mardiasmo (2009:131) "*value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang memperhatikan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sektor publik dalam pengelolaan organisasi". Kinerja suatu pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, outcome secara bersama-sama.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja organisasi pemerintah. Menurut Mahmudi (2010:83) pengertian *value for money* sebagai berikut. "*Value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Meski sama-sama menggunakan *value* dan *money*, konsep *value for money* sangat berbeda pengertiannya dengan konsep *time value for money* memiliki artian bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang". Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya.

*Value for money* harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan di dinas pariwisata karena nilai untuk uang digunakan menilai biaya suatu produk atau layanan terhadap kualitas persediaan, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor publik khususnya dinas pariwisata harus terukur dengan memperhatikan penyelenggaraan aktivitas keuangan. Pengukuran *value for money* berfungsi untuk mengetahui kinerja dinas pariwisata telah melaksanakan program kerjanya dengan ekonomis, efisien, dan efektif, terlebih dinas pariwisata mempunyai andil dalam merencanakan pembangunan pariwisata daerah dan berimplikasi pada harapan dari semua masyarakat. Menurut Mahsun (2006:145)

“kinerja dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategi suatu organisasi”. Dijelaskan juga oleh Mulyadi (2007) kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam mewujudkan perencanaan strategis yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga kinerja dapat dijadikan pedoman untuk mengkaji program-program yang sudah berjalan. Sasaran pengukuran *value for money* adalah pengukuran kegiatan atau program secara finansial. Keterukuran program secara finansial akan tercermin dari laporan keuangan pemerintah daerah. Prasetya (2005) menjelaskan Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan pemakaian sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan padanya.

Indikator *value for money* meliputi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Halim (2002), pengertian ekonomi mempunyai arti biaya terendah. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengertian sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara berhati-hati serta cermat dan tidak ada pemborosan dalam pengelolaan sumber dayanya.

Program kerja dalam organisasi adalah kewajiban pengurus, yang nantinya akan dijalankan oleh organisasi dalam jangka waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Menurut Soepardi (dalam Eriyanto, 2003:29) mengemukakan bahwa sebuah program kerja yang disusun oleh suatu organisasi mengacu pada visi dan misi yang ada dan terjabarkan dalam bentuk program. Jabaran program ini biasanya terspesifikasi dalam sebuah langkah-langkah strategis untuk menjawab semua masalah-masalah yang ada, sekaligus untuk mencapai target-target yang menjadi tujuan bersama. Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar memiliki sebanyak 6 (enam) program inti yang dilaksanakan dari tahun 2013–2018. Program yang dijalankan dinas pariwisata

adalah pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan jaringan pelayanan informasi pariwisata. Masing-masing program dalam setiap tahunnya akan memiliki kegiatan yang ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan perencanaan dan penganggaran biayanya.

Setiap program yang direncanakan akan menetapkan tujuan sehingga perlu adanya analisis kebijakan. Dijelaskan oleh Widodo (2008:27) “Analisis Kebijakan, sebagai disiplin intelektual terhadap masalah publik menggunakan sejumlah teknik dan gaya (*techniques and style*, tergantung kepada masalah dan orientasi para analis (*problem and orientation of the analyst*)”. “Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan sehingga terdapat sebuah gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi” Bastian (2006:274). Hal ini menunjukkan prestasi yang diraih organisasi sektor publik. Tangkilisan, (2005:169), menyatakan “...ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik adalah *work/demand, economy, efficiency, effectiveness, dan equity*”.

Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan.

Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik

digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan Mardiasmo (2009).

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Lohman (dalam Nainggolan, 2007:156), mengemukakan "Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan-tujuan strategis organisasi". Dinas pariwisata telah melakukan pengukuran kinerja dimana dianggap cukup berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% (*input*) dan melaksanakan program tahunan (*output*), tanpa ada melakukan penilaian terhadap aspek hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan juga dampak (*impact*).

Hal ini dijadikan catatan penting untuk dilakukan sebuah kajian manilai keberhasilan realisasi program kerja. Kinerja dinas pariwisata bisa dilihat jika program yang dijalankan dapat diukur, sesuai dengan tuntutan saat ini terhadap sektor publik yang menghendaki pemerintahan yang bersih, maka dilakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar telah melakukan pengukuran kinerja namun masih terbatas pada pengukuran besarnya realisasi kegiatan yang sudah dijalankan. Dinas pariwisata belum melakukan pengukuran pelaksanaan program kinerja secara ekonomis, efisien, dan efektif maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap dinas pariwisata dalam merealisasikan program.

Dengan demikian dapat diketahui kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam rangka perencanaan pembangunan Pariwisata Kabupaten Gianyar melalui pengukuran *value for money*.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar 2014-2016 jika ditinjau dari perspektif ekonomi *value for money*, realisasi program kerja Dinas

Pariwisata Kabupaten Gianyar 2014-2016 jika ditinjau dari perspektif efisiensi *value for money*, dan realisasi program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar 2014-2016 jika ditinjau dari perspektif efektivitas *value for money*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Arikunto (2010:3) "penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain (keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian". Penelitian ini berfokus pada pengamatan realisasi program kerja yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar melalui penerapan pengukuran *value for money* yakni perspektif ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Gianyar.

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dan objek penelitian ini adalah laporan kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data laporan kinerja keuangan yang ditargetkan dan direalisasikan.

Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data berkaitan dengan laporan kinerja keuangan tahun 2014-2016, yang terdiri dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengukuran kinerja kegiatan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wawancara tidak tersruktur dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, untuk memperoleh

informasi terkait pengukuran kinerja yang dilakukan.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan metode analisis *value for money* untuk mengetahui kinerja dinas pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Temuan dalam penelitian ini adalah mengenai anggaran dan realisasi biaya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan pengukuran kinerja kegiatan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dana yang digunakan Dinas Pariwisata menjalankan programnya, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, dalam menjalankan program

internalnya Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar menyelenggarakan kegiatan belanja langsung, dari anggaran dan realisasi biaya yang ada di dinas pariwisata akan dianalisis secara berturut-turut selama tiga tahun dengan menggunakan pengukuran *value for money*, sehingga dapat diketahui kinerja dinas pariwisata dalam mengelola keuangan secara internal. Analisis *value for money* baik tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas dilakukan untuk tiga tahun, yakni tahun 2014, 2015, dan 2016.

Realisasi program kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dari perspektif ekonomi diketahui dengan melakukan perhitungan rasio ekonomis, kemudian dirumuskan kedalam kriteria kinerja keuangan.

Jadi uraian program kerja dan kegiatan serta rasio ekonomis Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Uraian Program Kerja dan Kegiatan Serta Rasio Ekonomis Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016

No	Program dan Kegiatan	Rasio Ekonomis 2014 (%)	Rasio Ekonomis 2015 (%)	Rasio Ekonomis 2016 (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,82	95,69	97,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	66,57	105,68	97,88
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	97,75	100,00	100,14
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	72,07	92,12	113,37
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	95,85	79,09
6	Program Pengembangan Kemitraan	94,76	83,31	86,30
7	Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata	100,00	100,55	89,65

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 1 terlihat bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar memiliki program yang sama.

Rasio ekonomis tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan tingkat ekonomis setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2016 banyak program yang mencapai rasio 100%, walaupun beberapa program menunjukkan penurunan kinerja. Penganggaran kurang baik memang

terlihat di tahun 2014 dan 2015 banyak rasio yang menunjukkan kisaran 60-80%. Dari rasio-rasio tersebut akan dirumuskan ke dalam kriteria kinerja keuangan yang bersumber dari Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan.

Berdasarkan Tabel 1 terkait program kerja dan kegiatan serta rasio ekonomi dinas pariwisata tahun 2014-2016, akan ditentukan kriteria kinerja keuangan Dinas

Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam merealisasikan program kerjanya pada

tahun 2014-2016 seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Melalui Pengukuran Ekonomis Tahun 2014-2016

No	Program	Rasio Ekonomis 2014	Rasio Ekonomis 2015	Rasio Ekonomis 2016
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kurang Ekonomis	Sangat Ekonomis	Ekonomis
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Ekonomis	Ekonomis	Sangat Ekonomis
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kurang Ekonomis	Ekonomis	Sangat Ekonomis
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	Ekonomis	Kurang Ekonomis
6	Program Pengembangan Kemitraan	Ekonomis	Cukup Ekonomis	Cukup Ekonomis
7	Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata	Ekonomis	Sangat Ekonomis	Cukup Ekonomis

Realisasi program kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dari perspektif efisiensi dilakukan dengan membandingkan keluaran biaya dengan anggaran dana setelah perubahan. Tingkat efisiensi dapat diketahui dengan melakukan perhitungan rasio efisiensi, kemudian dirumuskan kedalam kriteria kinerja keuangan, selanjutnya dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata

Kabupaten Gianyar telah mampu melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Berikut ini uraian program kerja dan kegiatan serta rasio efisiensi Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar tahun 2014-2016 dapat dijelaskan melalui tabel 3.

Tabel 3. Uraian Program Kerja dan Kegiatan Serta Rasio Efisiensi Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016

No	Program dan Kegiatan	Rasio Efisien 2014 (%)	Rasio Efisien 2015 (%)	Rasio Efisien 2016 (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,14	90,51	92,73
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	97,97	99,28	90,39
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	99,35	99,60	99,41
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	76,19	99,60	99,66
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	96,29	97,91
6	Program Pengembangan Kemitraan	99,09	96,06	98,84
7	Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata	94,60	97,39	97,46

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa ada program kerja yang tidak bisa ditentukan rasio efisiennya karena belum direalisasikan atau dijalankan pada tahun tersebut, terlihat juga pada tahun 2016 rasio berkisar 90%-100% yang mengindikasikan kinerja yang kurang efisien dan cenderung mengalami penurunan kinerja dari tahun 2014 dan

2015. Dari tabel 3 akan diformulasikan menjadi kriteria kinerja yang bersumber dari Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Kinerja Keuangan. Kriteria tersebut digunakan untuk melihat tingkat efisiensi program Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang telah dijalankan selama tahun 2014–2016, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Melalui Pengukuran Efisiensi Tahun 2014–2016

No	Program	Rasio Efisiensi 2014	Rasio Efisiensi 2015	Rasio Efisiensi 2016
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	Kurang Efisien	Kurang Efisien
6	Program Pengembangan Kemitraan	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
7	Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien

Kriteria efisiensi berlawanan dengan kriteria ekonomis dan efektivitas, hal ini dikarenakan saat mencapai 100% kinerja dikatakan tidak efisien yang berarti tidak dapat menekan biaya-biaya dalam menjalankan programnya. Presentase 90%-100% tergolong kriteria yang kurang efisien, hal ini berarti antara biaya dan anggaran hampir sama dan mendekati 100%.

Presentase 80%-90% tergolong kriteria cukup efisien, yang berarti kinerja yang cukup baik. Presentase 60%-80% dan kurang dari 60% masing-masing tergolong efisien dan sangat efisien. Kriteria efisien adalah yang paling penting dalam pengukuran *value for money* karena penggunaan biaya akan terlihat pada rasio ini, dalam rasio ini juga dapat ketahui cara organisasi dalam memanfaatkan anggarannya sesuai

dengan program maupun kegiatan yang direncanakan.

Realisasi program kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dari perspektif efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara keluaran biaya dengan dampak atau hasil dalam mencapai tujuan program. Uraian program dan kegiatan serta rasio efektivitas Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2014–2016 dapat dilihat pada Tabel 5.

Terlihat pada tabel 5 bahwa semua kegiatan maupun program memiliki rasio efektivitas sebesar 100%. Hal ini dikarenakan bahwa dinas pariwisata menyamakan antara *output* dengan *outcome*-nya, dengan kata lain antara keluaran biaya dengan dampak dari program yang dijalankan sama baik secara finansial maupun secara fisik program. Dengan demikian besarnya keluaran dengan semua biaya-biaya akan

berakibat sama dengan hasilnya, tidak menutup kemungkinan semua program berjalan sangat efektif. Terlihat pada DPPA antara keluaran dan hasil disamakan secara kuantitas, sama halnya ada pengukuran kinerja kegiatan Dinas

Pariwisata Kabupaten Gianyar menyamakan antara keluaran biaya dengan hasil yang didapatkan dari penyelenggaraan suatu program kerja atau kegiatan.

Tabel 5. Uraian Program Kerja dan Kegiatan Serta Rasio Efektivitas Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2014–2016.

No	Program dan Kegiatan	Rasio Efektivitas 2014 (%)	Rasio Efektivitas 2015 (%)	Rasio Efektivitas 2016 (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	100,00	100,00	100,00
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	100,00	100,00	100,00
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100,00	100,00	100,00
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	100,00	100,00	100,00
6	Program Pengembangan Kemitraan	100,00	100,00	100,00
7	Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 5 maka dipaparkan kriteria kinerja keuangan yang bersumber dari Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang kriteria kinerja keuangan.

Kriteria efektivitas Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar selama tiga tahun dari 2014–2016 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Melalui Pengukuran Efektivitas Tahun 2014–2016.

No	Program	Rasio Efektivitas 2014	Rasio Efektivitas 2015	Rasio Efektivitas 2016
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Efektif	Efektif	Efektif
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Efektif	Efektif	Efektif
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Efektif	Efektif	Efektif
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Efektif	Efektif	Efektif
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	Efektif	Efektif
6	Program Pengembangan Kemitraan	Efektif	Efektif	Efektif
7	Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Informasi Pariwisata	Efektif	Efektif	Efektif



## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan dapat dilihat realisasi program dari perspektif ekonomi *value for money*, menunjukkan program yang dijalankan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar selama tahun 2014–2016 berada pada kriteria tidak ekonomis sampai sangat ekonomis. Secara teoritis ekonomis menekankan pada penggunaan dana serendah-rendahnya guna menghindari pemborosan atau ada unsur kehematan didalamnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar sudah baik, tetapi ada beberapa kinerja yang sudah baik menjadi kinerja yang kurang baik. Terlihat pada Tabel 4.2, pada program peningkatan sarana dan prasarana tahun 2015 dan 2016 sudah menunjukkan kinerja sangat ekonomis dan ekonomis yakni dengan rasio ekonomis 105,86% dan 97,88%, namun tahun 2014 terjadi sebaliknya, yakni kinerjanya tergolong tidak ekonomis dengan rasio ekonomis sebesar 66,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana pada tahun 2014 tidak terlalu memperhatikan kebutuhan dana saat itu sehingga menganggarkan terlalu besar dari target anggarannya.

Penganggaran kurang ekonomis terlihat pada program pengembangan pemasaran pariwisata yakni tahun 2014 memiliki rasio ekonomis 72,07%, 2015 rasio ekonomisnya 92,12% dan tahun 2016 rasio ekonomisnya 113,27%. Hal ini mengindikasikan bahwa penganggaran selama dua tahun sebelumnya untuk program tersebut belumlah ekonomis, karena kinerja tahun sebelumnya kurang memperhatikan kebutuhan dana sehingga menganggarkan terlalu besar dari target anggarannya, tetapi pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi sangat ekonomis. Penganggaran kurang ekonomis juga terlihat pada program pengembangan destinasi pariwisata, yakni pada tahun 2015 memiliki rasio ekonomis 95,85% dan tahun 2016 rasio ekonomisnya 79,09%, tetapi pada 2014 program ini belum dilaksanakan. Program ini tahun 2014

belum di laksanakan karena pada tahun tersebut program pengembangan destinasi pariwisata belum dibutuhkan.

Program-program yang berjalan kurang ekonomis dan cukup ekonomis, ada juga program yang memiliki konsistensi anggaran yaitu pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Perlu menjadi kajian tersendiri bagi dinas pariwisata untuk bisa mengalokasikan dana pada setiap program secara tepat. Pada saat program itu ditargetkan anggarannya seharusnya sudah bisa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan kebutuhan dana yang diperlukan, sehingga anggaran pelaksanaannya tidak jauh berbeda dari target yang sudah ditentukan.

Realisasi program yang diukur dengan rasio efisiensi terlihat bahwa dinas pariwisata kurang melakukan kegiatan operasional organisasi dengan menggunakan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Secara teoritis akan berbanding terbalik jika dilihat dari kajian efisiensi. Efisiensi mengkehendaki penggunaan anggaran yang serendah-rendahnya, sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap program karena dihabiskan anggarannya.

Dinas pariwisata melaksanakan program dengan tingkat efisiensi yang masih tergolong kurang efisien, hampir disemua program memiliki rasio antara 90-100% tergolong kurang efisien. Namun ada satu program yang dapat mencapai rasio efisien yaitu Program pengembangan Pemasaran Pariwisata yang pada tahun 2014 memiliki rasio sebesar 76,19%, hal ini menunjukkan program yang bisa menekan biaya serendah-rendahnya dianggarkan, namun kembali menjadi kurang efisien pada tahun 2015 dan 2016. Seharusnya tahun 2014 pada program tersebut dapat dijadikan pedoman untuk bisa memanfaatkan anggaran dalam menjalankan program secara tepat sehingga tidak terjadi pemborosan.

Berbeda halnya dengan tingkat ekonomis dan efisien, untuk rasio efektivitas semua program di setiap tahunnya memiliki kriteria yang tergolong

efektif yakni mencapai rasio 100%. Dalam menyelenggarakan programnya dinas pariwisata akan menyamakan antara keluaran dan hasil. Jadi semua besarnya keluaran dengan semua biaya-biaya akan berakibat sama dengan hasilnya. Tingkat efektivitas akan berbanding terbalik dengan tingkat efisiensi, karena jika dalam pengukuran efisiensi menghabiskan semua biaya, berakibat pada kinerja yang tidak efisien, namun jika memungkinkan biaya untuk tetap dihabiskan demi mencapai tujuan maka segi pengukuran efektivitas semua program akan berjalan efektif, terlihat pada kinerja dinas pariwisata perspektif efektivitas.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Selama tahun 2014-2016, realisasi program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dari perspektif ekonomi yaitu, 4 program tergolong kriteria sangat ekonomis, 10 program tergolong ekonomis, 3 program tergolong cukup ekonomis, 3 program tergolong kurang ekonomis, dan 1 program yang tidak bisa ditentukan rasio ekonomisnya karena belum dilaksanakan dan tidak dianggarkan dalam DPA. Realisasi program dinas pariwisata dari perspektif efisiensi yaitu 1 program tergolong kriteria efisien, 19 program tergolong kurang efisien, dan 1 program belum dilaksanakan. Keseluruhan realisasi program dinas pariwisata dari perspektif efektivitas tergolong efektif.

### Saran

Selanjutnya ada baiknya Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar menggunakan pengukuran *value for money*, karena akan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kinerja keuangan di dinas pariwisata. Metode sebelumnya hanya membandingkan antara anggaran dan biaya, tetapi *value for money* akan mengarahkan dinas pariwisata untuk bijak dalam pengalokasian dana dalam penganggaran, mengontrol biaya-biaya pelaksanaan program, dan memperjelas dampak maupun hasil dari realisasi program. Program yang dijalankan dapat terukur

secara kuantitatif, baik secara ekonomis, efisien maupun efektif dan dinas pariwisata bisa meningkatkan kinerja setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Dalam Negeri. 1996. *Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. 2016. *Peraturan Daerah*. Tersedia pada <http://diparda.gianyarkab.go.id/index.php/en/>, (diakses pada tanggal 29 November 2016).
- Eriyanto. 2003. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahsun, Moh. 2006. *Penilaian Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nainggolan, Pahala. 2007. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

- Prasetya, Edy. 2005. *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: ANDI.
- Ratmiko & Atik Septi Winarsih. 2009. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik Cetakan Kedua*. Jakarta: Bayumedia Publishing